

**LAPORAN PENELITIAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA
DI PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018**

**JUDUL PENELITIAN
PENGEMBANGAN MODEL PENANAMAN NILAI-NILAI
PANCASILA PADA MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI**



Oleh:

Dr. TAAT WULANDARI, M.Pd.

ANIK WIDIASTUTI, M.Pd.

Dr. NASIWAN, M.Si.

SITI NUR KHOLIFAH

MAFLAKHATUN NISA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
OKTOBER 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Ketika menjadi dasar negara maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebaiknya yang melandasi kehidupan masyarakat. Tiap butir dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang sudah selayaknya menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Selama ini, terlebih pada masa pemerintahan tiga dasa warsa, pelembagaan nilai-nilai Pancasila hanya sebatas retorika. Bangsa Indonesia masih memamerkan sebagian perilaku yang berbanding terbalik dari apa yang diamanatkan oleh Pancasila. Pancasila juga sebagai falsafat bangsa Indonesia. Dalam tataran filsafat, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harusnya diturunkan ke dalam hal-hal yang bersifat implementatif di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini akan mengembangkan model penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Lalu apa kaitannya korupsi dan Pancasila? Korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak tertanam dengan baik dalam diri masyarakat.

Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan perilaku tindak pidana. Dari Pancasila, korupsi sangat bertentangan dengan sila kelima yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dapat menjadi sumber untuk memberantas korupsi, sumber nilai anti korupsi. Indikasi bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila terjerembab ke arah penyimpangan yakni ditunjukkan oleh banyaknya kasus korupsi di Indonesia.

Penanaman Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah mudah. Dan saatnya implementasi nilai-nilai Pancasila direvitalisasi sebagai dasar negara bersama norma-norma agama. Revitalisasi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan anti korupsi sebagai medium menanamkan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu perlu suatu model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa model penanaman nilai-nilai Pancasila pada mata kuliah pendidikan anti korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengembangkan model implementasi nilai-nilai Pancasila melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi?
2. Bagaimana tingkat kelayakan implementasi nilai-nilai Pancasila melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengembangkan model implementasi nilai-nilai Pancasila melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi.
2. Mengetahui tingkat kelayakan implementasi nilai-nilai Pancasila melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi.

D. Manfaat Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Model pembelajaran yang dikembangkan diharapkan dapat menambah khasanah dalam bidang pendidikan.
2. Model pembelajaran yang dikembangkan dapat diterapkan pengajar dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran .
3. Model pembelajaran yang dikembangkan dapat menjadi alternatif metode pembelajaran yang menarik.
4. Model pembelajaran yang dikembangkan dapat menjadi bahan masukan teoritis bagi peneliti yang akan datang agar dapat dikembangkan penelitian yang lebih mendalam mengenai model penanaman nilai-nilai Pancasila.

E. Spesifikasi Pengembangan

Spesifikasi produk yang akan dikembangkan adalah:

1. Produk yang dikembangkan berupa model pembelajaran.
2. Model pembelajaran ini disebut dengan MRAP “*My Real Action for Pancasila*”.
3. Model pembelajaran yang dikembangkan digunakan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran.
4. Model pembelajaran yang dikembangkan terdapat 5 langkah kegiatan.
5. Model pembelajaran ini merupakan salah satu tipe dari *project based learning*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

a. Nilai-nilai Pancasila

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan pancasila itulah dalam hukum positif indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga Negara, tanpa kecuali (Ramadhani, 2016: 12).

Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara dalam arti sempit dapat diartikan sebagai semua norma yang ada dalam Pancasila menjadi acuan dan juga cita-cita normatif yang harus dilakukan khususnya dalam penyelenggaraan negara sehingga dapat melaju sesuai dengan para pendahulu inginkan (<https://perpustakaan.id>)

Prof. DR. Drs, Notonagoro, SH (1967) mengatakan, “ lima unsur yang terdapat pada pancasila bukanlah hal yang baru pada pembentukan Negara Indonesia, tetapi sebelumnya dan selama - lamanya telah dimiliki oleh rakyat bangsa Indonesia yang nyata ada dan hidup dalam jiwa masyarakat (Ramadhani, 2016: 14).

Kenyataan pancasila yang demikian disebut sebagai kenyataan yang objektif, yaitu bahwa kenyataan itu ada pada pancasila itu sendiri terlepas dari suatu yang lain atau terlepas dari pengetahuan orang.

kenyataan objektif yang ada dan terlekat pada pancasila, sehingga pancasila sebagai suatu sistem bersifat khas dan berbeda dengan sistem - sistem falsafah yang lain. Hal ini secara ilmiah disebut sebagai filsafah secara objektif (Notonegoro, 1975: 14).

Sebagai suatu ideologi maka pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya yang pertama adalah Logos yaitu rasionalitas atau penalaran, Pathos yaitu penghayatannya dan ethos yaitu kesusilaannya (Wibisono, 1996:3).

Max Scheler mengemukakan bahwa pada hakekatnya nilai itu berjenjang, jadi tidak sama tingginya dan tidak sama luhurnya. Notonagoro merinci nilai disamping berting juga berdasarkan jenisnya, ada yang bersifat material dan non material. Nilai - nilai pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai - nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai fital. Dengan demikian nilai - nilai pancasila tergolong nilai kerohanian yang juga mengandung nilai - nilai lain yang lengkap dan harmonis, yaitu nilai material, nilai fital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematis - hirarkis, dimana sila pertama sebagai basisnya dengan sila kelima sebagai tujuannya (Darmo Diharjo, 1978).

Pengertian lain dari Pancasila sebagai ideologi negara dalam artian yang luas bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip unsur ketuhanan, unsur kemanusiaan, unsur persatuan, unsur kerakyatan, dan unsur keadilan

harus dijunjung tinggi khususnya dalam mewujudkan semua visi dan misi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur kehidupan rakyatnya dalam berbangsa dan juga bernegara (perpustakaan.id).

Pancasila memiliki fungsi sebagai ideologi negara sebagai berikut (perpustakaan.id):

1) Sarana pemersatu masyarakat.

Dalam menyelesaikan semua konflik yang muncul, Pancasila memiliki peran penting selaku pedoman dalam penyelenggaraan visi dan misi dan bernegara yakni sebagai sarana pemersatu masyarakat. Hendaknya dalam mengatasi semua permasalahan yang muncul, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai patokan atau pedoman layaknya para pendiri bangsa Indonesia.

2) Pengingat dari visi dan misi dalam setiap pelaksanaan tugas

Adanya Pancasila sebagai ideologi negara juga dapat menjadi fungsi atau tujuan dari negara itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi negara berisi tentang nilai-nilai yang harus tetap dipegang teguh dalam pelaksanaan visi dan misi dari pemerintahan negara RI. Sehingga dapat dikatakan selain sebagai pengingat, Pancasila juga bisa menjadi pondasi dalam setiap pengambilan keputusan.

Berikut ini adalah nilai-nilai dalam lima sila Pancasila (Asmaorini, 2017: 58):

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah dimana kita sebagai manusia yang diciptakan wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Masyarakat Indonesia berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan wajib menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama masing-masing dan menjauhi apa yang dilarang.

2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kedua ini menjelaskan bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama dihadapan hukum.

3) Persatuan Indonesia

Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah.

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dalam ini menjelaskan tentang demokrasi, adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan dan penanganannya, dan kejujuran bersama.

5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna dalam sila ini adalah adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama, dan melindungi yang lemah.

b. Pendidikan Anti Korupsi

UU NO.31/1999 jo UU No.20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan:

- Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).
- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3)
- Kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11)
- Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10)
- Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12)
- Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7)
- Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C)

Penyelesaian korupsi sebagai permasalahan krusial bangsa harus diselesaikan dengan menggunakan pendekatan komprehensif yang melibatkan banyak pihak. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah melalui pendekatan kultural. (Murdiono, 2016: 169).

Sejauh gerakan melawan korupsi dijalankan di berbagai belahan dunia, bisa diidentifikasi 4 (empat) pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan yang dikutip dari Wijayanto dalam <https://acch.kpk.go.id/id>) yaitu:

- 1) Pendekatan Pengacara (*Lawyer approach*). Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang lebih bertanggungjawab. Pendekatan ini biasanya berdampak cepat (*quick impact*) berupa pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor, namun memerlukan biaya besar (*high costly*), meskipun di Indonesia misalnya, tantangan terbesar justru berasal dari para aparat hukum (kepolisian dan pengadilan) itu sendiri.
- 2) Pendekatan Bisnis (*Business approach*). Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Dengan kompetisi yang sehat dan insentif yang optimal maka diharapkan orang tidak perlu melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan.
- 3) Pendekatan Pasar atau Ekonomi (*Market or Economist approach*). Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antar agen (sesama pegawai pemerintah misalnya) dan sesama klien sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya.
- 4) Pendekatan Budaya (*Cultural approach*). Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap anti-korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk.

Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak besar (*low costly*), namun hasilnya akan berdampak jangka panjang (*long lasting*).

Prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi menurut Harto (2014: 124-125), terdiri dari:

- 1) Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga. Lembaga- lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor
- 2) Transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh public.
- 3) Kewajaran. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yakni: komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif

Tujuan Pendidikan Anti Korupsi menurut Hakim (2012: 145) yakni: pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi

B. Karakteristik Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi

Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi merupakan mata kuliah di Program Studi Pendidikan IPS semester 7. Mata kuliah Pendidikan anti korupsi memiliki beban 2 SKS, dimana mata kuliah ini lebih banyak membahas mengenai kasus-kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum, sosiologis dan politis serta menyajikan berbagai kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Selain itu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi juga membahas bagaimana upaya pencegahan terjadinya korupsi. Mata kuliah ini dipandang penting sebagai salah satu upaya pencegahan perilaku anti korupsi di Indonesia baik secara preventif maupun kuratif. Berikut isi mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Program Studi Pendidikan IPS FIS UNY:

1. Pertemuan 1: Orientasi dan arah kuliah pendidikan anti korupsi dengan kurikulum Pendidikan IPS.

Korupsi dari berbagai perspektif antara lain, korupsi dilihat dari perspektif hukum pidana, korupsi dilihat dari perspektif sosiologi, korupsi dilihat dari perspektif politik

2. Pertemuan 2: Posisi pendidikan anti korupsi dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Upaya untuk melakukan pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif dan dapat dilakukan secara kuratif atau ada yang bersifat pencegahan dan bersifat penindakan.

Kuliah pendidikan anti korupsi memiliki peran yang penting di dalam upaya pencegahan korupsi karena dengan mata kuliah ini kaum terpelajar atau mahasiswa diberikan pemahaman hal-hal yang termasuk korupsi secara hukum dan rujukan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sehingga pada masa ini mahasiswa memiliki pemahaman kompetensi akademik untuk dapat mengetahui korupsi dan sekaligus dapat berikhtiar untuk bersama-sama melakukan pencegahan anti korupsi di lingkungan masing-masing.

Secara konsepsional sisi hukum korupsi adalah satu tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat negara yang membuat kerugian pada negara, maka dapat dirumuskan bahwa korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat negara yang mengakibatkan kerugian negara. Secara praktis korupsi biasanya bertempat batam lokus jeleknya adalah terjadi pada tempat-tempat di mana terdapat sumber-sumber pemasukan negara bisanya di perpajakan kemudian tempat dibuatnya anggaran negara dan juga di istana.

Dapat dinyatakan bahwa korupsi di dalam demokrasi itu dimulai sejak menit pertama adanya kekuasaan ada 1 adagium dalam politik bawah

power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk *corrupt* maka semakin besar kekuasaan, semakin besar juga peluang untuk korupsi. Oleh karena itu maka korupsi terdapat di dalam lingkaran kekuasaan. Korupsi yang paling banyak terdapat pada level eksekutif di tempat-tempat penerimaan pendapatan negara juga di parlemen di mana dirumuskannya anggaran negara serta di istana.

3. Pertemuan 3: Sejarah dinamika upaya pemberantasan korupsi di Indonesia serta perbandingannya dengan berbagai negara.

Materi tentang sejarah atau dinamika pencegahan pemberantasan korupsi ini disajikan pada mahasiswa agar masuk dapat mengambil pelajaran dari materi tersebut dan memiliki pengetahuan juga kesadaran bagaimana ikut terlibat di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

4. Pertemuan 4: Korupsi yang terjadi di dunia seputih atau dunia politik kita. Pada materi ini pembahasan dipusatkan pada disertasi Doctor ABC tentang korupsi di dunia politik.

5. Pertemuan 5: Peta korupsi di dunia politik.

Korupsi itu petanya dari Sabang sampai Merauke, yaitu korupsi di lembaga eksekutif atau di pemerintahan daerah sampai di DPRD, DPD Indonesia. Berbagai kasus korupsi yang terjadi di seluruh Indonesia diskusikan secara lebih mendetail.

6. Pertemuan 6: Korupsi di parlemen dan politik kartel.

Materi korupsi di parlemen juga masih membicarakan korupsi-korupsi yang terjadi di parlemen dengan membahas bukunya Doktor Ambardi serta membahas politik kartel. Politik kartel adalah basis mengapa ada korupsi di parlemen yaitu karena terjadi kerjasama di antara partai politik yang saling melindungi.

Inti dari berdekatan adalah memandang bahwa kegiatan merupakan transaksi materi dan transaksi modal. Seharusnya politik adalah kegiatan panggilan *moral noblesse oblige*, jadi orang berpolitik harus rela dan dia memiliki panggilan suci untuk menyelamatkan bangsanya. Akan tetapi ketika politik itu menjadi kegiatan transaksional maka di situlah terjadinya korupsi kekuasaan, saling melindungi antara berbagai kekuatan politik untuk menggunakan atau untuk mencuri APBN.

7. Pertemuan 7: Perkembangan mutakhir korupsi di dalam dunia politik.

Pada materi ini dilakukan diskusi antar kelompok untuk membahas perkembangan mutakhir yang terjadi Indonesia tentang korupsi-korupsi yang terjadi dalam dunia politik, yang dilakukan oleh partai-partai politik. Korupsi yang terdapat pada partai politik merupakan bagian dari pembahasan atau elaborasi dari korupsi politik

8. Pertemuan 8: Gerakan anti korupsi di Indonesia.

Gerakan anti korupsi merupakan sebuah usaha yang berangkat dari satu ide bagaimana memerangi korupsi baik pada level birokrasi pemerintah

eksekutif, maupun korupsi di parlemen, maupun korupsi di swasta. Gerakan ini berusaha untuk merubah agar terdapat satu akar, satu komunitas (community) di simpul-simpul baik itu di parlemen, di masyarakat, tema pendidikan yang bertujuan agar mempersempit ruang korupsi baik secara kultural maupun sejarah birokrasi

Gerakan anti korupsi sejalan dengan upaya pencegahan secara preventif karena apabila pelaku korupsi itu hanya secara formal secara kuratif dihukum, hasilnya kurang efektif. Akan lebih baik apabila terdapat usaha secara kultural dari pendidikan dan dari sisi budaya, agar pencegahan korupsi meluas di mana-mana.

Gerakan anti korupsi ditujukan untuk menumbuhkan zona-zona anti korupsi di berbagai simpul di masyarakat sehingga pada ujungnya masyarakat akan malu untuk melakukan tindakan korupsi karena korupsi termasuk tindakan yang melanggar prinsip kemanusiaan yang sejalan dengan sila kedua dari Pancasila.

9. Pertemuan 9: Bahaya korupsi bagi Indonesia dan bagi pembangunan di Indonesia.

Bagaimana *rationing* korupsi dapat membahayakan dan dapat meruntuhkan Indonesia. Bagaimana logika korupsi itu dapat sampai pada kesimpulan membuat Indonesia bisa menjadi runtuh. Jalan raya menjadi cepat rusak, pendidikan rusak. Hal ini dapat menjadikan bangkrut dan runtuh.

Tindakan korupsi adalah tindakan kejahatan luar biasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan karena tindakan itu telah terbukti menyengsarakan ribuan bahkan jutaan manusia di Indonesia, maka itu harus dikutuk dan dianggap tidak beradab kalau banyak masyarakat berpandangan dan menyadari bahwa korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Maka adalah merupakan satu instrumen intelektual saat semacam framing intelektual agar orang itu tidak korupsi.

10. Pertemuan 10: Peran pendidikan khususnya kampus dalam gerakan anti korupsi.

Pada pertemuan ini difokuskan pada pembahasan bahwa karena korupsi itu menyangkut salah satu kebudayaan, satu orientasi hidup, satu cara berpikir, satu *mindset*, maka upaya untuk mencegah korupsi adalah dengan cara merubah *mindset*. Ketika lembaga pendidikan itu didalamnya berisi orang-orang yang punya *mindset* tidak sepakat dengan korupsi maka hal ini dapat menjadi banteng yang kuat, benteng yang penting untuk pertahanan sekaligus untuk mendorong adanya gerakan anti korupsi.

11. Pertemuan 11: Urgensi atau pentingnya agama dalam memerangi korupsi.

Pada pertemuan ini dibahas pentingnya peran agama, tokoh-tokoh agama, ajaran agama, ormas agama, doktrin-doktrin agama dalam ikut serta memperkuat pemahaman untuk memerangi korupsi di Indonesia, misalnya ada buku yang dibuat oleh Muhammadiyah dan NU yang membahas bahwa orang yang korupsi itu kalau meninggal tidak disholati.

Hal itu merupakan bentuk hukuman sosial bagi orang-orang yang korupsi. Korupsi itu zakatnya tidak diterima oleh korpus, tidak diterima hajinya. Fiqih politik seperti ini perlu digalakkan agar orang-orang yang korupsi merasa adanya *social punishment* dari masyarakat dan dari agama.

Materi pertemuan 11 ini secara keimanan dapat dirujuk pada beberapa ayat Alquran: “aladina amanu kulu wasrobu halalan toyyiban”. Orang yang beriman dan Hawa memakan makanan yang halal dan baik dan jangan memakan makanan yang haram. Aini Shakira adalah landasan teologis agar orang itu tidak korupsi. Juga dicari landasan ontologis keimanan pada agama-agama lain.

12. Pertemuan 12: Sinergi gerakan anti korupsi di Indonesia. Pada pertemuan ini dibahas bagaimana upaya untuk mensinergikan gerakan-gerakan anti korupsi yang ada di Indonesia baik dari jalur moral, jalur keagamaan, jalur pendidikan, gerakan intelektual, dan kebudayaan gerakan politik.

Pembahasan pada pertemuan ini ditujukan agar siswa memiliki optimisme terhadap gerakan anti korupsi karena didukung oleh berbagai elemen masyarakat yang pada akhirnya akan berhasil dan akan dapat menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan karena tindakan korupsi. Sikap optimisme ini perlu dibangun di kalangan mahasiswa, optimisme yang berdasar pada argumen-argumen yang empiris dan rasional dan mempunyai pijakan moral.

13. Pertemuan 13-16: Strategi baru memberantas korupsi di lingkungan terdekat. Mahasiswa siswa diminta membuat satu tulisan ringkas sekitar 7 Halaman yang berisi tentang bagaimana strategi baru memberantas korupsi dari lingkungan terdekat mahasiswa baik dari keluarga, misalnya dari tempat kos, dari Hima, dari BEM, dari ormawa, atau tempat perkumpulan pemuda. Tulisan dibuat dalam bentuk karya inspiratif tentang pemberantasan korupsi dari lingkup yang paling kecil agar sadar anti korupsi yang diharapkan dapat menyelamatkan Indonesia.

C. Strategi Pembelajaran dalam Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi

Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang banyak membahas kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia perlu menggunakan berbagai variasi model pembelajaran pada perkuliahan. Beberapa metode pembelajaran yang dipakai dalam perkuliahan Pendidikan anti korupsi antara lain:

1. Metode ceramah

Metode ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai Pendidikan anti korupsi serta peletakan dasar materi pendidikan anti korupsi. Penerapan metode ceramah yaitu saat membahas tentang orientasi dan arah kuliah pendidikan anti korupsi dengan kurikulum Pendidikan IPS, Posisi pendidikan anti korupsi dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia, Sejarah dinamika upaya pemberantasan korupsi di Indonesia serta perbandingannya dengan berbagai negara.

2. Metode diskusi digunakan pada materi yang lebih membutuhkan pemikiran mahasiswa dalam kelompok. Metode diskusi digunakan pada materi Sejarah dinamika upaya pemberantasan korupsi di Indonesia serta perbandingannya dengan berbagai negara.
3. Metode *problem based learning* atau pembelajaran berbasis masalah digunakan pada materi yang lebih bersifat pemecahan masalah. Berkaitan dengan materi pada mata kuliah Pendidikan anti korupsi metode *problem based learning* diterapkan pada materi Sejarah dinamika upaya pemberantasan korupsi di Indonesia serta perbandingannya dengan berbagai negara
4. Metode *active debate*: Metode debat aktif atau yang disebut dengan *active debate* diterapkan pada materi yang membutuhkan pemikiran mahasiswa serta kemampuan menganalisis permasalahan, memberikan argumentasi, mengkritisi dan memberikan solusi melalui debat antar kelompok. Materi yang relevan diajarkan dengan metode debat aktif yaitu Peran pendidikan khususnya kampus dalam gerakan anti korupsi, serta urgensi atau pentingnya agama dalam memerangi korupsi.
5. Metode *project based learning*. Metode *project based learning* atau pembelajaran berbasis proyek ditujukan agar mahasiswa menghasilkan suatu karya atau produk. Karya atau produk yang menjadi proyek dalam mata kuliah Pendidikan anti korupsi berupa karya tulis tentang strategi baru memberantas korupsi di lingkungan

terdekat. Materi inilah yang nanti akan dibuat dengan PAP (Poster Aksi Pancasila).

D. Indikator Pencapaian Kompetensi

Mata Kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang urgensi pendidikan anti korupsi, memahami bahaya korupsi bagi kemajuan dan pembangunan Indonesia, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi di bidang kehidupan, langkah-langkah mengatasi korupsi, dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia.

E. Kajian Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Mulayani, Anik Widiastuti, dan Supriyanto dengan judul “Pengembangan Model Evaluasi Hasil Belajar Mata Kuliah Kewirausahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelayakan model evaluasi hasil belajar mata kuliah kewirausahaan: validasi ahli diperoleh skor 4,42; uji coba penggunaan oleh dosen diperoleh skor 4,2325; serta uji coba penggunaan oleh mahasiswa diperoleh skor 4,067 yang secara keseluruhan berada pada kriteria sangat baik.

Penelitian ini juga menggunakan model penelitian dan pengembangan Borg dan Gall, yang ditujukan untuk menghasilkan model evaluasi hasil belajar berupa instrumen penilaian hasil belajar mata kuliah

kewirausahaan. Sedangkan penelitian pengembangan yang dilakukan ini menghasilkan model implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sebuah poster.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, Darsono, Pargito, dengan judul “Pengembangan Model Pembelajaran Inquiry untuk Meningkatkan Kemampuan Memecahkan Masalah Sosial di Masyarakat.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa model inquiry memberikan kemudahan siswa dalam memecahkan masalah sosial di masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Model Pengembangan

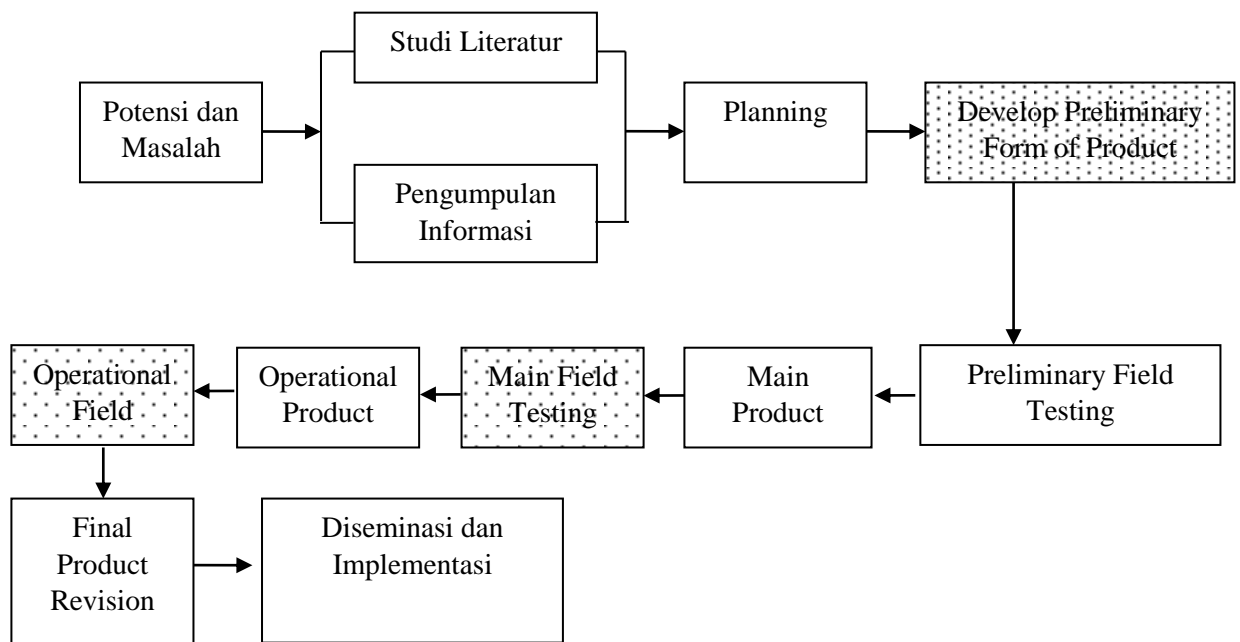
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau dikenal dengan istilah R&D (*Research and Development*), yang bertujuan untuk mengembangkan model penanaman nilai-nilai Pancasila pada Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian dan pengembangan ini diharapkan menghasilkan model yang disebut dengan MRAPP (*My Real Action Plan for Pancasila*). MRAPP merupakan model pembelajaran yang dapat digunakan untuk penanaman nilai-nilai Pancasila.

Pengembangan model MRAPP (*My Real Action Plan for Pancasila*) ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (*research and development*). Penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang diarahkan untuk menghasilkan produk tertentu sekaligus menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2011: 407). Penelitian pengembangan tidak hanya digunakan untuk mengembangkan suatu produk baru tetapi dapat juga digunakan untuk menyempurnakan produk yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 2012: 164). Menurut W.R. Brog dan M.D. Gall (Setyosari, 2015: 276), penelitian dan pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. R & D terdiri dari 1) mengkaji dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan produk yang akan dikembangkan 2) mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, 3) melakukan serangkaian validasi dan uji coba dengan latar tempat yang sama ketika produk tersebut akan

digunakan dan 4) melakukan revisi terhadap hasil validasi dan uji coba. Berdasarkan pemaparan beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk baru dan menguji keefektifan produk.

B. Prosedur Pengembangan

Penelitian pengembangan ini menggunakan model pengembangan Borg & Gall yang dimodifikasi menjadi tujuh langkah pengembangan. Model pengembangan Borg & Gall digunakan sebagai panduan untuk penelitian pengembangan. Langkah-langkah pengembangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Model Pengembangan

Prosedur pengembangan model penanaman nilai-nilai Pancasila pada Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi disederhanakan kembali menjadi

empat tahapan yaitu studi pendahuluan, perencanaan produk, pengembangan produk, evaluasi dan diseminasi. Tahap-tahap tersebut dijelaskan di bawah ini:

1. Tahap studi pendahuluan.

Studi pendahuluan merupakan pengumpulan data awal yang terdiri dari studi analisis kompetensi, pengamatan kelas, dan identifikasi masalah. Hal ini dilakukan pada perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi, untuk mengetahui kompetensi yang harus dicapai serta permasalahan yang terjadi.

2. Perencanaan Produk

Hasil yang diperoleh dari studi pendahuluan kemudian diolah dan dijadikan bahan penyusunan perencanaan produk yaitu penetapan kompetensi dan pemetaan model penanaman nilai-nilai Pancasila.

3. Pengembangan produk

Tahap pengembangan produk terdiri dari penyusunan produk, penyusunan pedoman penggunaan produk, validasi produk, dan revisi. Validasi yang dilakukan adalah validasi terhadap model penanaman nilai-nilai Pancasila yang telah dikembangkan yaitu MRAPP (*My Real Action Plan for Pancasila*) yang terdiri dari tujuh langkah kegiatan pembelajaran.

4. Tahap evaluasi dan diseminasi

Tahap evaluasi dan diseminasi yang terdiri dari uji coba terbatas, revisi, uji coba diperluas, revisi akhir dan diseminasi. Penelitian ini belum mencapai tahap 4, baru mencapai tahap pengembangan dikarenakan uji coba yang direncanakan pada mata kuliah Pendidikan anti korupsi apabila menyesuaikan dengan RPS yang ada maka akan terjadi di pertemuan ke 13 sampai dengan 16. Sehingga uji coba model belum dilakukan dan direncanakan akan diuji coba pada tahun berikutnya.

C. Uji Coba Produk

Uji coba penelitian dilakukan dengan tujuan mengukur kelayakan dan kualitas produk berupa model pembelajaran MRAPP (*My Real Action Plan for Pancasila*) sebagai model penanaman nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan pada pembelajaran baik di lingkungan pendidikan tinggi maupun pendidikan menengah (SMP dan SMA). Data yang diperoleh akan dijadikan sebagai dasar penyempurnaan produk.

Validasi produk model penanaman nilai-nilai Pancasila dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan mulai bulan April 2018 sampai dengan Oktober 2018. Subjek uji coba validasi desain produk model penanaman nilai-nilai Pancasila merupakan ahli pembelajaran serta ahli Pendidikan Pancasila. Pada tahap validasi, dilakukan oleh 5 validator, yang terdiri dari 3 orang ahli pembelajaran dan 2 orang ahli Pendidikan Pancasila.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini dibuat sendiri oleh peneliti kemudian divalidasi oleh ahli yang biasa disebut dengan *expert judgement* sehingga diperoleh alat pengumpulan data yang valid dan reliabel. Data yang diperoleh melalui kegiatan uji coba diklasifikasi menjadi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang berupa kritik dan saran yang dikemukakan ahli pembelajaran dan ahli Pendidikan Pancasila dihimpun dan disarikan untuk memperoleh produk model penanaman nilai-nilai Pancasila. Data yang diperoleh dari angket yang berupa data kuantitatif diolah dengan teknik analisis data kuantitatif. Pengolahan data kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif.

Instrumen penelitian menggunakan angket dengan rating scale skor 1 sampai dengan 5. Tabel kisi-kisi instrumen dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Pengumpulan Data

Aspek	Indikator	Butir No.	Jumlah Butir
Aspek Petunjuk	Ketersediaan petunjuk	1,2	2
Aspek Bahasa	Kesesuaian bahasa	3,4,5	3
Aspek Substansi	Kesesuaian langkah-langkah model pembelajaran	6,7,8,9	4
Aspek Pembelajaran	Keberpusatan/ <i>Centrality</i>	10,11	2
	Berfokus pada pertanyaan/ <i>Driving Question</i>	12	1
	Investigasi konstruktif/ <i>Constructive</i>	13,14,15	3

	<i>Investigation</i>		
	Kemandirian/ <i>Autonomy</i>	16	1
	Realisme/ <i>Realism</i>	17,18	2
JUMLAH			18

E. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian pengembangan produk ini menggunakan analisis statistik deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berasal dari data hasil wawancara dengan dosen secara tidak terstruktur. Data kuantitatif diolah menggunakan analisis data kuantitatif dengan bantuan program SPSS Statistics 16. Produk penelitian pengembangan dianalisis sesuai dengan karakteristik masing-masing produk untuk mengetahui apakah produk memenuhi kriteria kelayakan.

Penentuan kategori kelayakan instrumen ditentukan berdasarkan tinjauan ahli dan praktisi dengan kriteria penentuan kategori kepraktisan menggunakan skala 5 yang diadopsi dari Azwar (2010: 163).

Tabel 2. Kriteria Kepraktisan

Interval Skor Rata-Rata	Kategori
$(M + 1,5s) < X$	Sangat Baik
$(M + 0,5s) < X \leq (M + 1,5s)$	Baik
$(M - 0,5s) < X \leq (M + 0,5s)$	Cukup Baik
$(M - 1,5s) < X \leq (M - 0,5s)$	Kurang Baik
$X \leq (M - 1,5s)$	Tidak Baik

Keterangan: M = Rerata skor ideal

$$= 1/2 (\text{skor maksimal ideal} + \text{skor minimal ideal})$$

S = Simpangan baku skor ideal

$$= 1/6 (\text{skor maksimal ideal} - \text{skor minima ideal})$$

X = Rata-rata skor total

Skor maksimal ideal = \sum butir kriteria x skor tertinggi

Skor minimal ideal = \sum butir kriteria x skor teren

Instrumen dinyatakan layak apabila dari hasil perhitungan diperoleh skor dalam kategori “baik”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses Pengembangan Produk

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran untuk penanaman nilai-nilai Pancasila yang diberi nama MRAPP (*My Real Action*)

Plan for Pancasila). Proses pengembangan model pembelajaran ini melalui beberapa tahapan diantaranya:

a. Potensi dan Masalah

MRAPP (My Real Action Plan) sebagai model penanaman nilai-nilai Pancasila melalui mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dikembangkan berdasarkan identifikasi potensi masalah yang dilakukan dengan cara observasi langsung ketika perkuliahan. Potensi dan masalah yang diperoleh dalam observasi perkuliahan yakni:

- 1) Berdasarkan pengamatan pada saat pembelajaran di kelas, siswa kurang aktif dalam pembelajaran.
- 2) Dosen masih menjadi sumber belajar utama bagi mahasiswa karena mahasiswa cenderung hanya mengandalkan informasi dari dosen dan buku.
- 3) Pembelajaran kurang mengaktifkan siswa karena didominasi dengan ceramah dari dosen.
- 4) Penggunaan model pembelajaran kurang variatif.
- 5) Mata kuliah anti korupsi perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan model pembelajaran yang tepat.

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan masalah tersebut dapat diambil solusi yakni perlunya pengembangan model pembelajaran yang dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila. Hasil produk penelitian dan pengembangan berupa model pembelajaran ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu cara dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila.

b. Pengumpulan data

1) Menentukan Standar Kompetensi dan Penyusunan RPP

Pengumpulan data awal dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi yang diterapkan pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kompetensi serta capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata kuliah. MRAP (My Real Action Plan for Pancasila) sebagai model pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila relevan untuk dikembangkan dan diterapkan pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dikarenakan banyak muatan nilai-nilai yang perlu ditanamkan pada mahasiswa yang inti nilai tersebut terkandung dalam Pancasila.

2) Analisis Kebutuhan Model Pembelajaran

Setelah menentukan model yang akan dikembangkan maka dilanjutkan tahap kedua yaitu perencanaan. Tahap perencanaan ini berisi perencanaan model yang akan dikembangkan dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dikembangkan.

c. Desain produk

MRAPP (My Real Action Plan for Pancasila) ini merupakan model pembelajaran untuk penanaman nilai-nilai Pancasila. MRAPP disusun dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang menunjukkan aktivitas siswa dalam bentuk *real action* atau aksi nyata. Model pembelajaran MRAPP terdiri dari 7 langkah kegiatan seperti yang tercantum pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Langkah-langkah Model MRAPP

Langkah-langkah model pembelajaran yang terdapat pada bagan di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Observasi lapangan

Model pembelajaran MRAP (*My Real Action Plan For Pancasila*) pada prinsipnya merupakan suatu pembelajaran berbasis kegiatan riil. Sebagai bahan merancang aksi mahasiswa melakukan studi awal berupa observasi lapangan untuk menggali masalah yang akan dipecahkan dengan merancang aksi yang disebut dengan *real action*. Observasi lapangan dapat dilakukan di organisasi atau lembaga yang akan dijadikan lokasi melaksanakan *real action*.

2. Menentukan salah satu sila dari Pancasila

. Pada langkah ini, mahasiswa menentukan salah satu sila dari Pancasila yang nantinya akan menjadi basis *real action* mereka. Oleh sebab itu, salah

satu butir tersebut harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah kemudian hal-hal apa saja yang akan menjadi *real action* muncul untuk diselesaikan oleh mahasiswa.

2. Merancang *Real Action*

Langkah ini akan melatih mahasiswa menjadi mandiri. Mahasiswa diberi dorongan untuk menentukan kegiatan nyata. Mahasiswa diberikan keleluasaan untuk berinovasi dan berkreasi melalui rancangan *real action*. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok dan atau individual.

3. Membuat Jadwal Kegiatan *Real Action* dan Presentasi proposal MRAP

Mahasiswa membuat jadwal untuk melaksanakan dan melaporkan hasil *real action*. Kegiatan dapat dilakukan selama semester perkuliahan berlangsung. Meskipun demikian, mereka tetap harus membuat sebuah penjadwalan yang menjaga agar proyek dapat terselesaikan secara baik dengan menggunakan waktu yang efektif. Di sinilah kemampuan berpikir mahasiswa juga dilatih untuk kritis dan pandai memperkirakan hal-hal apa yang perlu mereka lakukan untuk persiapan, pembuatan, hingga *real action* mereka dapat terselesaikan tanpa harus molor dari batas waktu yang ditetapkan.

4. Memantau Pelaksanaan Kegiatan *Real Action/Progress Report*

Pada waktu tatap muka, dosen dapat menggunakan waktu untuk memantau kegiatan. Hal-hal apa saja yang mendukung dan menghambat kegiatan dibicarakan bersama. Jika terdapat hambatan maka harus dicari solusinya oleh kelompok tersebut dan dosen memeriksa agar semua dapat terkendali. Langkah keempat ini tidak hanya dilihat dari aspek dosen saja,

tetapi juga harus dilihat dari aspek mahasiswa. Apakah sudah berjalan sesuai perencanaan mereka atau belum? Apa hambatan yang ditemui? Lalu apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? Kemajuan proyek perlu tersus dipantau oleh dosen yang mungkin dapat memberikan bantuan tambahan jika memang diperlukan. Selain itu mahasiswa juga harus belajar bekerja sesuai rencana jadwal yang mereka buat, apakah semuanya sudah berjalan dengan baik.

5. Melaporkan Proses dan Hasil Kegiatan *Real Action*

Langkah ini merupakan tahap untuk tiap kelompok melaporkan proses dan hasil kegiatan. Dosen juga memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan *Real Action* mahasiswa. Laporan proses dan hasil kegiatan dapat berupa poster, video aksi, cerita pendek atau cerpen, cerita bergambar atau komik. Laporan ini dibuat sesuai dengan kreativitas mahasiswa masing-masing.

6. Melakukan Refleksi

Tahap ini dosen memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan refleksi diri atas kerja tiap-tiap kelompok. Dosen juga memfasilitasi mahasiswa untuk berpikir dan mengingat kembali hal-hal terbaik apa yang telah dapat mereka buat selama mengerjakan kegiatan *real action*, lalu hal-hal apa yang masih perlu diperbaiki.

d. Validasi

Validasi dilakukan untuk mengetahui kevalidan model penanaman nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan. Pada proses validasi akan diperoleh saran

masukan yang dijadikan acuan oleh pengembang untuk melakukan revisi dalam rangka memperbaiki produk sesuai dengan masukan dan saran dari para ahli. Validasi dilakukan oleh 5 orang ahli yang terdiri dari 3 ahli pembelajaran dan 2 ahli pendidikan Pancasila, kemudian dilakukan revisi sesuai dengan masukan dan saran dari para ahli tersebut.

e. Revisi

Setelah tahap validasi selesai, dilakukan revisi. Data yang diperoleh dari validator menjadi acuan dalam memperbaiki model pembelajaran. Berdasarkan validasi ahli, masing-masing memberikan masukan pada pengembangan model pembelajaran ini. Pengembang kemudian memperbaiki model pembelajaran tersebut sesuai dengan saran dan masukan para validator guna mendapatkan model pembelajaran yang baik sebelum dilakukan uji coba lapangan. Penelitian dan pengembangan ini baru sampai pada tahap revisi produk model pembelajaran dan belum dilakukan uji coba produk dikarenakan pada RPS mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, MRAPP akan diterapkan pada pertemuan ke 13 sampai dengan 16, sedangkan waktu penelitian telah berakhir dan perkuliahan baru sampai pertemuan ke 10. Berdasarkan hal tersebut uji coba model pembelajaran direncanakan akan dilaksanakan pada tahap penelitian tahun berikutnya.

2. Hasil validasi dan pengembangan produk

MRAPP (My Real Action Plan for Pancasila) sebagai model pembelajaran untuk penanaman nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan ini divalidasi oleh ahli

yaitu dosen dari Jurusan Teknologi Pembelajaran Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta serta dosen dari Jurusan Pendidikan Pancasila Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Validasi ahli dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2018. Pada tahap ini, selain melakukan penilaian ahli materi juga diminta untuk memberikan saran dan komentar terhadap model pembelajaran yang dikembangkan. Saran dan komentar ahli dijadikan acuan peneliti untuk melakukan revisi terhadap produk model pembelajaran.

Identifikasi kecenderungan tinggi rendahnya skor validasi ahli dan uji penggunaan ditetapkan berdasar kriteria ideal. Skor tertinggi (ST) 5 dan skor terendah (SR) 1. Untuk menentukan Mean ideal (M) dan Standar Deviasi ideal (S) dihitung acuan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{array}{ll}
 M & = \frac{1}{2} (ST + SR) \\
 & = \frac{1}{2} (5 + 1) \\
 & = \frac{1}{2} (6) \\
 & = 3 \\
 \\
 M + 1,5 S & = 3 + 1,5 (0,67) \\
 & = 4,005 \\
 \\
 M + 0,5 S & = 3 + 0,5 (0,67) \\
 & = 3,335 \\
 \\
 S & = \frac{1}{6} (ST - SR) \\
 & = \frac{1}{6} (5 - 1) \\
 & = \frac{1}{6} (4) \\
 & = 0,67 \\
 \\
 M - 1,5 S & = 3 - 1,5 (0,67) \\
 & = 1,995 \\
 \\
 M - 0,5 S & = 3 - 0,5 (0,67) \\
 & = 2,665
 \end{array}$$

Dengan harga M dan S tersebut dapat dikategorikan kecenderungan skor sebagai berikut:

Tabel 3. Pedoman Penentuan Kategori Skor

Interval Skor Rata-Rata	Kategori
-------------------------	----------

$4,005 < X$	Sangat Baik
$3,335 < X \leq 4,005$	Baik
$2,665 < X \leq 3,335$	Cukup Baik
$1,995 < X \leq 2,665$	Kurang Baik
$X \leq 1,995$	Tidak Baik

Tabel di atas dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kriteria skor perolehan hasil validasi. Model pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan layak apabila memperoleh skor dengan kategori “CUKUP BAIK” yaitu dengan skor berkisar antara 2,665 sampai dengan 3,335.

Hasil validasi ahli pembelajaran serta hasil validasi ahli Pendidikan Pancasila dijelaskan di bawah ini:

a. Hasil validasi ahli pembelajaran

Tabel 4. Hasil Validasi Ahli Pembelajaran

No.	Indikator	Total	Rata-rata
1	Ketersediaan petunjuk	22	3,6667

2	Kesesuaian bahasa	35	3,8889
3	Kesesuaian langkah-langkah model pembelajaran	38	3,1667
4	Keberpusatan/ <i>Centrality</i>	18	3
5	Berfokus pada pertanyaan/ <i>Driving Question</i>	11	3,6667
6	Investigasi konstruktif/ <i>Constructive Investigation</i>	32	3,5556
7	Kemandirian/ <i>Autonomy</i>	12	4
8	Realisme/ <i>Realism</i>	23	3,8333
	Total Penilaian	191	3,597222

Berdasarkan data yang ada pada tabel 4 diketahui bahwa skor total dari validasi ahli pembelajaran memperoleh skor total 191, dan rata-rata keseluruhan sebesar 3,597222. Skor tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan layak dengan kategori skor “baik”. Skor tertinggi untuk masing-masing indikator terdapat pada indikator kemandirian atau *autonomy* dengan skor sebesar 4 termasuk pada kategori “baik”, sedangkan skor terendah terdapat pada indikator keberpusatan/*centrality* dengan skor sebesar 3 termasuk pada kategori “cukup baik”.

b. Hasil Validasi Ahli Pendidikan Pancasila

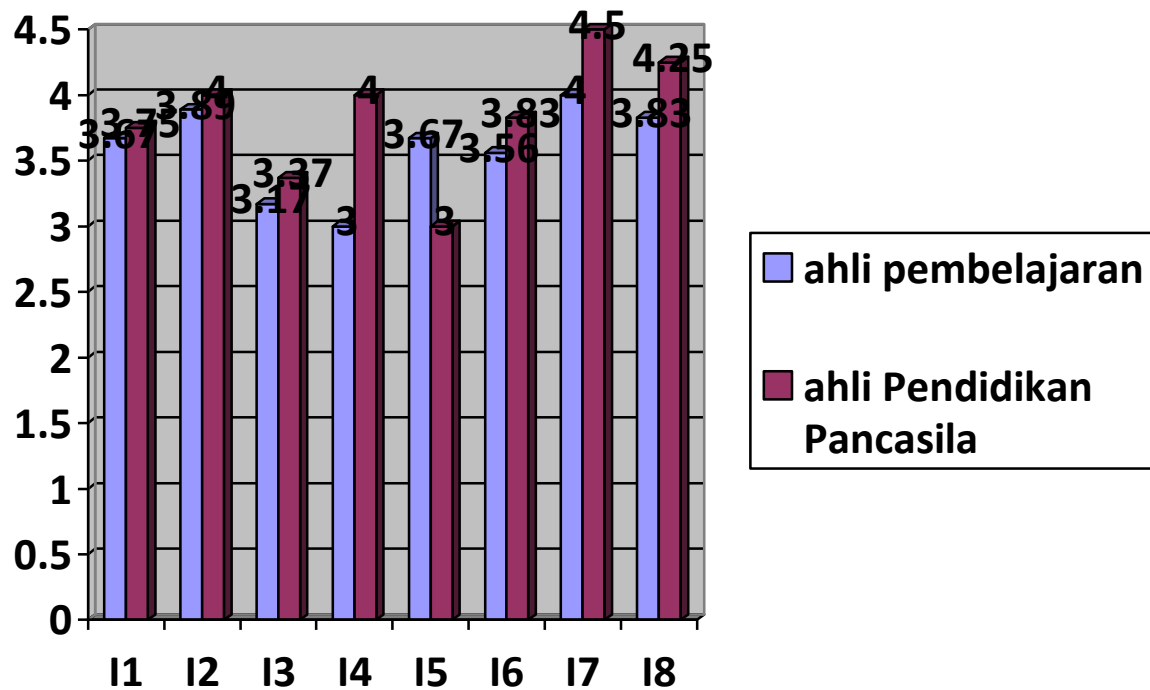
Tabel 5. Hasil Validasi Ahli Pembelajaran

No.	Indikator	Total	Rata-rata
1	Ketersediaan petunjuk	15	3,75
2	Kesesuaian bahasa	24	4

3	Kesesuaian langkah-langkah model pembelajaran	27	3,375
4	Keberpusatan/ <i>Centrality</i>	16	4
5	Berfokus pada pertanyaan/ <i>Driving Question</i>	6	3
6	Investigasi konstruktif/ <i>Constructive Investigation</i>	23	3,8333
7	Kemandirian/ <i>Autonomy</i>	9	4,5
8	Realisme/ <i>Realism</i>	17	4,25
	Total Penilaian	137	3,838542

Berdasarkan data yang ada pada tabel 4 diketahui bahwa skor total dari validasi ahli pembelajaran memperoleh skor total 137, dan rata-rata keseluruhan sebesar 3,838542. Skor tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan layak dengan kategori skor “baik”. Skor tertinggi untuk masing-masing indikator terdapat pada indikator kemandirian atau *autonomy* dengan skor sebesar 4,5 termasuk pada kategori “sangat baik”, sedangkan skor terendah terdapat pada indikator berfokus pada pertanyaan/*Driving Question* dengan skor sebesar 3 termasuk pada kategori “cukup baik”.

Untuk mempermudah pemaparan hasil validasi oleh ahli di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram batang di bawah ini:



Gambar di atas menunjukkan bahwa skor perolehan secara masing-masing aspek berada pada kategori cukup baik, baik, dan sangat baik sehingga instrumen dinyatakan layak.

Apabila kedua skor perolehan dari validasi pembelajaran dan validasi ahli Pendidikan Pancasila dibuat reratanya maka dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 6. Rerata Hasil Validasi Ahli

No	Validator	Skor
1	Ahli pembelajaran	3,597222
2	Ahli Pendidikan Pancasila	3,838542
Rerata		3,717882

Tabel 6 menunjukkan bahwa skor rerata hasil validasi ahli sebesar 3,717882 dan termasuk pada kategori “baik”.

B. Pembahasan

1. Pengembangan model penanaman nilai-nilai Pancasila

Pengembangan model penanaman nilai-nilai Pancasila yang dilakukan dengan mengikuti langkah pengembangan Borg & Gall yang disederhanakan menjadi 4 tahapan telah menghasilkan model pembelajaran untuk penanaman nilai-nilai Pancasila. Tahapan pengembangan dilakukan melalui berbagai proses serta revisi demi memperoleh model penanaman nilai-nilai Pancasila yang tepat dan layak digunakan.

Pancasila yang saat ini nilai-nilainya sudah mulai kurang dipahami dan kurang diterapkan dalam pembelajaran diharapkan dapat ditanamkan kembali karena nilai-nilai Pancasila mengandung karakter yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional. MRAPP (*My Real Action Plan for Pancasila*) merupakan model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk penanaman nilai-nilai Pancasila.

Pada tahap validasi ahli diperoleh beberapa saran untuk perbaikan model penanaman nilai-nilai Pancasila yang berhasil dikembangkan berupa model pembelajaran yang disebut dengan MRAPP (*My Real Action Plan for Pancasila*). Saran-saran yang diberikan oleh validator atau ahli antara lain:

a. Ahli pembelajaran 1:

Ahli pembelajaran 1 memberikan saran antara lain: perlunya peninjauan fenomena-fenomena yang akan dijadikan bahan penyusunan MRAPP

sehingga tahapan MRAPP perlu ditambah studi lapangan di awal proyek, mekanisme monitoring dan controlling progress report secara riil yang akan dilaksanakan, memperjelas materi pembelajaran yang sesuai untuk diajarkan dengan model MRAPP serta kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila.

b. Ahli pembelajaran 2

Ahli pembelajaran 2 memberikan saran antara lain: perlu adanya observasi awal untuk menyusun MRAPP, perlu presentasi rencana aksi dan hasil aksi, perlu adanya panduan penilaian proyek yang jelas pada setiap langkahnya.

c. Ahli pembelajaran 3

Ahli pembelajaran 3 memberikan saran antara lain: proyek yang akan diaksikan lebih baik dirancang jangan hanya 4 pertemuan tetapi dapat dibuat menjadi proyek semester atau proyek setengah semester karena merupakan proyek besar.

d. Ahli Pendidikan Pancasila 1

Ahli Pendidikan Pancasila 1 memberikan saran antara lain: perlunya rincian yang jelas pada setiap langkah-langkah model pembelajaran tentang alokasi waktu yang dibutuhkan, nilai-nilai Pancasila yang akan ditanamkan harus diperjelas, pelaporan hasil proyek perlu diperjelas bentuk dan mekanisme pelaporannya seperti apa.

e. Ahli Pendidikan Pancasila 2

Ahli Pendidikan Pancasila 2 memberikan saran antara lain: penentuan permasalahan yang akan dijadikan aksi harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan kompetensi mata kuliah, perlu adanya laporan akhir sebagai pelaporan keberhasilan aksi Pancasila yang dilakukan serta ketercapaian penanaman nilai-nilai Pancasila yang diharapkan.

Setelah memperoleh saran dari ahli, peneliti merevisi model pembelajaran yang dikembangkan serta melengkapi sintaks agar lebih jelas dan lengkap dalam penggunaannya. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa model yang dikembangkan layak untuk digunakan sebagai model penanaman nilai-nilai Pancasila.

2. Kelayakan model penanaman nilai-nilai Pancasila

Hasil penelitian dilakukan dengan mengolah hasil validasi ahli media pembelajaran dan ahli Pendidikan Pancasila. Untuk hasil validasi ahli dihitung skor rerata pada seluruh aspek yang kemudian diketahui perbandingan antara masing-masing ahli. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa model yang dikembangkan “layak” karena hasil validasi memiliki rerata skor 3,717882 dan termasuk dalam kategori “baik”. Adapun rincian skor hasil validasi adalah validasi ahli pembelajaran memperoleh skor rerata 3,597222 dan validasi ahli Pendidikan Pancasila memperoleh skor 3,838542 dimana keduanya termasuk dalam kategori “baik”.

Perolehan skor masing-masing indikator, untuk ahli pembelajaran indikator yang paling tinggi terdapat pada indikator kemandirian atau *autonomy*. sedangkan indikator yang memperoleh skor terendah terdapat pada indikator keberpusatan atau *centrality*. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran yang dikembangkan mampu memberikan kemandirian mahasiswa karena aktivitas yang dilakukan membutuhkan banyak pemikiran serta aksi riil oleh mahasiswa sendiri.

Perolehan skor masing-masing indikator, untuk ahli Pendidikan Pancasila indikator yang paling tinggi terdapat pada indikator realisme atau *realism* sedangkan indikator yang memperoleh skor terendah terdapat pada indikator berfokus pada pertanyaan atau *driving question*. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran yang dikembangkan memiliki *realism* yang tinggi karena berupa aksi riil atau yang disebut dengan real action untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam suatu aksi yang direncanakan, yang dapat berupa aksi individu maupun aksi kelompok.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan model penanaman nilai-nilai Pancasila ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penelitian dan pengembangan model penanaman nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya: melihat potensi dan masalah yang ada di lapangan, pengumpulan data dilanjutkan dengan analisis kebutuhan model pembelajaran, desain produk, validasi, revisi dan jadilah produk akhir berupa model penanaman nilai-nilai Pancasila yang disebut dengan MRAPP (*My Real Action Plan for Pancasila*) dengan delapan langkah pembelajaran yang terdiri dari: a) observasi lapangan, b) menentukan salah 1 sila dari Pancasila; c) merancang *real action/proposal*; d) membuat jadwal kegiatan *real action* dan presentasi proposal; e) memantau pelaksanaan *real action/progress report*; f) melaporkan proses dan hasil *real action*; g) melakukan refleksi.
2. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari validasi ahli pembelajaran maupun validasi ahli Pendidikan Pancasila, model pembelajaran MRAPP (*My Real Action Plan for Pancasila*) memiliki rerata skor 3,717882 dan termasuk dalam kategori “baik” sehingga “Layak” digunakan untuk model penanaman nilai-nilai Pancasila. Adapun rincian masing-masing ahli sebagai berikut: hasil analisis kelayakan menurut validasi ahli pembelajaran

memperoleh skor 3,597222 dan hasil validasi ahli Pendidikan Pancasila memperoleh skor sebesar 3,838542 dimana keduanya termasuk pada kategori “Baik”.

B. Saran Pemanfaatan Produk

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan ini, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. MRAPP (*My Real Action Plan for Pancasila*) dapat dipilih menjadi salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan pada mata kuliah yang membutuhkan ide serta aksi nyata yang dapat dilakukan oleh mahasiswa sebagai model penanaman nilai-nilai Pancasila.
2. Dosen yang akan menerapkan MRAPP (*My Real Action Plan for Pancasila*) harus mampu mengintegrasikan materi dan pelaksanaan real action karena aksi membutuhkan waktu yang cukup panjang yaitu sampai dengan 8 pertemuan.
3. Perlu dilakukan uji coba lebih lanjut untuk mata kuliah yang relevan terutama dalam pembentukan sikap mahasiswa untuk mengetahui efektivitas model yang telah dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmaroini, A. P. (2017). Menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1 No 2 Januari 2017*. E-ISSN 2527-7057, P-ISSN 2545-2683
- Azwar, S. (2010). *Sikap manusia teori dan pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, L. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol 10. No. 2 tahun 2012*.
- Harto, K. (2014). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama. *Jurnal Intizar. Vol 20. No. 1 tahun 2014*
<https://perpustakaan.id/pengertian-pancasila-dan-fungsi-pancasila-sebagai-ideologi-negara>
https://acch.kpk.go.id/id/component/bdthemes_shortcode/?view=download&id=0a40daa1ef996ba7101bf999929590.
- Murdiono, M. (2016). Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PKn untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP. *Socia. Volume 15. No.1 Juni 2016*
- Ramadhani. (2016). repository.unpas.ac.id /13097/4/12
- Setyosari, P. (2015). *Metode penelitian pendidikan dan pengembangan*. Prenada Media. Jakarta.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2012). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang No.31/1999 jo UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Wahyuni, S., Darsono., Pargito. (2016). “Pengembangan Model Pembelajaran Inquiry untuk Meningkatkan Kemampuan Memecahkan Masalah Sosial di Masyarakat.” *Jurnal Studi Sosial Vol 4, No 1 (2016). Halaman 30-41*